

KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ananias Dian Hadini

NPP. 32.0683

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0683@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M. AP.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The phenomenon of vagrants and beggars reflects the complexity of social problems that demand a coordinated response across sectors. Pontianak City is facing a surge in homeless and beggar activities in public spaces that have an impact on disturbance of order, potential criminality, and a decrease in the quality of urban space. **Purpose:** This research aims to describe the collaboration in handling vagrants and beggars in Pontianak City, through a study of the Pamong Praja Police Unit and the Social Service Office. **Method:** This research was conducted based on a descriptive qualitative approach. This approach was used by the author because the qualitative model is able to describe a topic in detail and in depth which is very suitable for the theme raised by the author. The research data collection techniques include participatory field observations, document studies and interviews, and data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the theory of Government Collaboration according to Ansell and Gash (2007). The informants involved in this research amounted to 9 groups of informants. Then data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. The researcher acted as the sole research instrument. **Result:** The results of this study seen through the concept of collaboration by Ansell and Gash prove that, in the dimension of initial conditions it is seen that collaboration is still starting at the initial stage of implementation, then in the dimension of institutional design it is known that there is still no institutional structure and perfect division of tasks, in the dimension of facilitative leadership it has been seen that there is a good initiative from the coconut area of Pontianak City for the implementation of collaboration to solve the problem of vagrancy, finally in the dimension of the collaboration process it has not been carried out optimally considering the absence of a legal umbrella that oversees it. **Conclusion:** In general, the handling of vagrancy cases by Satpol PP and the Pontianak City Social Service through the concept of collaboration is still not optimal and not well institutionalized due to resource imbalances, the absence of collaborative regulations, and the lack of face-to-face dialogue between actors.

Keywords: Homeless and Beggars, Handling, Collaboration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena gelandangan dan pengemis mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang menuntut respons terkoordinasi lintas sektoral. Kota Pontianak menghadapi lonjakan aktivitas gelandangan dan pengemis di ruang publik yang berdampak pada gangguan ketertiban, potensi kriminalitas, serta penurunan kualitas tata ruang kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, melalui studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas

Sosial. **Metode:** Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan oleh penulis karena model kualitatif mampu mendeskripsikan suatu topik dengan rinci dan mendalam dimana hal tersebut sangat sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data penelitian meliputi observasi lapangan secara partisipatif, studi dokumen dan wawancara, serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori Kolaborasi Pemerintahan Menurut Ansell dan Gash (2007). Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 9 kelompok informan. Kemudian analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun peneliti bertindak sebagai instrument penelitian tunggal. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian ini dilihat melalui konsep kolaborasi oleh Ansell dan Gash membuktikan bahwa, pada dimensi kondisi awal terlihat bahwa kolaborasi masih mulai pada tahap awal pelaksanaan, selanjutnya pada dimensi desain kelembagaan diketahui masih belum terdapat struktur kelembagaan dan pembagian tugas yang sempurna, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif sudah terlihat adanya inisiatif yang bagus dari kelapa daerah Kota Pontianak untuk pelaksanaan kolaborasi penyelesaian masalah gelandangan, terakhir pada dimensi proses kolaborasi masih belum dilakukan dengan maksimal mengingat belum adanya payung hukum yang menaunginya. **Kesimpulan:** Secara umum penanganan kasus gelandangan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak melalui konsep kolaborasi masih belum optimal dan belum terlembagakan secara baik akibat ketimpangan sumber daya, absennya regulasi kolaboratif, dan minimnya dialog tatap muka antaraktor.

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Penanganan, Kolaborasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan isu sosial yang kompleks dan terjadi secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang (Wilson, 2019). Berdasarkan laporan dari Ruff Institute of Global Homelessness, sulit untuk memperoleh data resmi dan akurat mengenai jumlah gelandangan secara global karena belum adanya definisi baku yang disepakati secara internasional (Ranasinghe, 2015). Istilah tunawisma mencakup berbagai kondisi, mulai dari individu yang tidur di ruang terbuka seperti jalanan, hingga mereka yang tidak memiliki tempat tinggal permanen yang layak huni. Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2021 memperkirakan 2% populasi dunia atau 150 juta orang adalah tunawisma.

Sekitar 15 juta orang mengalami penggusuran, 1,6 miliar orang tinggal di tempat tinggal yang tidak layak, dan 1,1 miliar orang hidup di permukiman ilegal. Sementara itu, Institute of Global Homelessness memperkirakan sebanyak 330 juta orang di dunia hidup dalam kondisi tunawisma absolut. Angka-angka ini menunjukkan bahwa fenomena gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang bersifat global (Ploszka, 2020). Secara geografis, terdapat 11 negara di Asia Tenggara, dan 9 diantaranya masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan data terkini, berikut jumlah tunawisma di negara-negara dengan kategori berkembang di Asia Tenggara, antara lain :

Tabel 1

No	Negara	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
1	Filipina	4,5 juta jiwa
2	Indonesia	3 juta jiwa
3	Myanmar	1,5 juta jiwa
4	Vietnam	152.000 jiwa
5	Malaysia	14.863 jiwa

6	Laos	6.000 jiwa
7	Kamboja	3.000 jiwa
8	Thailand	2.499 jiwa
9	Singapura	1.036 jiwa

Sumber : *World Bank, 2024*

Data ini mencerminkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam jumlah tunawisma setelah Filipina. Di Indonesia, istilah "gelandangan dan pengemis" merupakan istilah yang umum digunakan dalam wacana kebijakan sosial. Secara terminologis, Kementerian Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pengemis sebagai individu yang melakukan aktivitas meminta-minta, terlepas dari apakah ia memiliki tempat tinggal atau tidak. Sementara itu, gelandangan didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan biasanya menetap di jalanan, kolong jembatan, bangunan kosong, atau membangun tempat tinggal secara ilegal di ruang publik. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, angka kemiskinan yang cukup tinggi dengan lebih dari 9,5% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemerintahan Indonesia bertanggung jawab dalam urusan penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan yakni Urusan Sosial. Dibagi menjadi tujuh sub-bidang terutama pada sub bidang Rehabilitasi Sosial yakni upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembalikan status warga masyarakat lebih layak dan Sejahtera.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup tinggi pada Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan laporan media lokal, jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 406 gelandangan dan pengemis-, terdiri dari 236 gelandangan dan 170 pengemis. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2024, sebanyak 88 gelandangan dan pengemis telah diamankan dalam razia, belum termasuk total tahunan.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Sosial Kota Pontianak, permasalahan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor utama, antara lain kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, arus urbanisasi tanpa disertai keterampilan yang memadai, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memilih jalan menggelandang atau mengemis sebagai strategi bertahan hidup (Mulyana & Arsyilaa, 2022). Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak diketahui memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ketertiban umum (Madjid et al., 2022). Dalam hal ini diperlukan sistem kolaborasi yang cekatan dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis (Falvo, 2018). Berdasarkan informasi dari media lokal, aktivitas mereka banyak ditemukan di kawasan strategis seperti persimpangan lampu lalu lintas di sepanjang Jalan Gajah Mada maupun jalur Trans Kalimantan, yang merupakan akses utama penghubung antardaerah menuju Kota Pontianak.

Tabel 2

Tahun	Jumlah Gelandangan dan pengemis Tertangkap/Didata	Keterangan
2023	42 pengemis di luar panti (Dinsos)	Data pengemis di luar panti, belum termasuk manusia silver dan jenis lain. <i>Sumber :suarakalbar.co.id</i>

2024	88 gelandangan dan pengemis diamankan (termasuk manusia silver, pengemis, gelandangan)	37 orang dari luar kota, 51 warga Pontianak; 24 positif narkoba; 4 manusia silver diamankan <i>Sumber :kalbaronline.com</i>
------	--	--

Sumber : Diolah penulis (2025)

Dalam penelitian ini, peneliti hendaknya mengkaji kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Kolaborasi pemerintahan sepatutnya dilakukan yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi, di mana pemerintah daerah mengurus rumah tangganya sendiri dengan kreatif untuk memberikan hasil yang solutif. Selain itu peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan lapangan yang bertugas secara langsung juga terus diperhatikan dalam bekerja (Tefa & Purbosiwi, 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun kolaborasi menjadi fokus utama dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif dan pembagian peran yang jelas sering kali mengakibatkan tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan sumber daya, dan celah dalam pelayanan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana memperkuat jaringan kolaboratif, mengoptimalkan alur informasi, dan membangun sistem terpadu yang memungkinkan semua pihak berkontribusi secara optimal sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing termasuk dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai penegak peraturan (Suhendi, 2021).

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak seringkali terfokus pada solusi jangka pendek seperti penertiban dan rehabilitasi temporer, tanpa memadai mengatasi akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, kurangnya akses pendidikan, dan keterbatasan lapangan kerja. Terdapat kesenjangan dalam pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan dukungan psikososial jangka panjang. Penelitian ini dapat menggali bagaimana mengembangkan model kolaborasi yang tidak hanya menangani gejala, tetapi juga secara sistematis mengatasi faktor-faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis, termasuk melalui program-program inovatif yang melibatkan berbagai sektor Masyarakat (Watts, 2014).

Meskipun upaya penanganan gelandangan dan pengemis telah dilakukan, terdapat kesenjangan dalam melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam proses ini. Pendekatan top-down yang dominan sering kali mengabaikan pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana mengembangkan model kolaborasi yang lebih inklusif, yang tidak hanya melibatkan lembaga formal tetapi juga mengaktifkan peran tokoh masyarakat, kelompok sukarelawan, dan bahkan mantan gelandangan dan pengemis yang telah berhasil direhabilitasi. Fokus dapat diberikan pada bagaimana membangun kapasitas komunitas untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, serta menciptakan inisiatif berbasis masyarakat yang berkelanjutan dalam mencegah dan menangani masalah gelandangan dan pengemis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berawal dari inspirasi penulis pada penelitian terdahulu yang masih memiliki celah dengan pembahasan yang memiliki kesamaan, adapun penelitian pertama karya Rotua Marbun tahun 2025 *Collaborative Governance* Dalam Penanganan

Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2023 dengan hasil Kepercayaan Antar Peserta: Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial berjalan baik berkat komunikasi terbuka, rapat koordinasi rutin, dan saling membantu (Marbun et al., 2025).

Penelitian kedua karya Muhammad Hikmal tahun 2024 berjudul Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan (Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan), dengan hasil bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP sudah terbentuk, namun belum optimal (Hikmal et al., 2024).

Penelitian ketiga karya Yagus Triana tahun 2021 berjudul Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut, dengan hasil bahwa pelaksanaan kolaborasi di kabupaten Garut ini masih menemui banyak permasalahan sehingga hasilnya masih belum optimal (Triana & Kristian, 2021).

Penelitian keempat karya Ratih Pradhita Utami tahun 2021 berjudul Collaborative Governance Dalam Upaya Pengentasan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Yogyakarta dengan hasil Terdapat ketimpangan kapasitas antar instansi. Satpol PP lebih dominan dalam operasi lapangan, sedangkan Dinsos kekurangan SDM dan fasilitas (Utami, 2021).

Penelitian kelima karya Lailatus Safiroh tahun 2025 berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pengemis Dan Gelandangan (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surabaya), dengan hasil bahwa Dinsos telah melakukan penjangkauan, pembinaan, dan penempatan di panti sosial Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan SDM (Safiroh, 2025).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan fokus utama pada model kolaborasi inovatif antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika, tantangan, dan potensi sinergi antara dua instansi yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Kebaruan utama terletak pada analisis komprehensif tentang bagaimana integrasi fungsi pembinaan sosial dari Dinas Sosial dengan kapasitas penegakan ketertiban dari Satpol PP dapat menciptakan pendekatan holistik dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini tidak hanya mengungkap mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang efektif, tetapi juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam menyelaraskan tujuan rehabilitasi sosial dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Lebih lanjut, studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kolaborasi antar-instansi dapat meningkatkan efektivitas program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menciptakan solusi berkelanjutan yang mengatasi akar permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif di tingkat lokal, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang dapat diadaptasi untuk menangani isu-isu sosial kompleks di daerah lain.

Konsep ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dimana Kajian teori belum menggunakan kerangka yang kuat dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta pada penelitian (Hikmal et al., 2024). Selain itu penelitian terdahulu hanya menjalankan implementasi penanganan gelandangan dan pengemis tanpa melihat aspek kolaborasi pemerintah seperti pada penelitian (Safiroh, 2025).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, melalui studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penelitian terkait kolaborasi pemerintah dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. Metode ini dipilih dan digunakan mengingat metode ini memiliki sifat yang fleksibel dalam pelaksanaan penelitian serta mampu mengungkapkan dan mendeskripsikan topik secara rinci dan mendalam (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kolaborasi pemerintahan oleh (Ansell & Gash, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis subjek yang memang terlibat dalam kegiatan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, baik dari internal dinas maupun objek yang dituju. Adapun informan yang dipakai sejumlah 9 kelompok informan. Dimana informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan juga Kepala Satpol PP Kota Pontianak. Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada anggapan penulis kepada subjek yang dituju karena dirasa memiliki banyak informasi dan mampu menjelaskan topik yang sedang dibahas dengan rinci dan mendasar (Simangunsong, 2017). Analisis data penelitian dilakukan secara tematik dan dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi reduksi data, display data, dan penarikan Kesimpulan serta verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 20 hari di bulan Januari 2025. Lokasi penelitian ini adalah Kota Pontianak dengan lebih fokus pada titik titik tertentu yang menjadi target operasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang analisis kolaborasi pemerintah dalam menangani keresahan Masyarakat berupa kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. Adapun dimensi yang digunakan meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, dan juga kepemimpinan fasilitatif serta proses kolaborasi, dan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

3.1 Kondisi Awal

Dimensi ini terbangun atas beberapa indikator penjabar. Pada indikator pertama terkait dengan ketidakseimbangan sumber daya dengan temuan, Ketimpangan ini terutama terlihat dalam aspek jumlah personel, sarana operasional, dan kapasitas teknis masing-masing lembaga. Berdasarkan temuan lapangan, Satpol PP selaku pelaksana tugas penegakan ketertiban dan keamanan, justru mengalami keterbatasan signifikan dalam hal jumlah personel yang tersedia, padahal lembaga ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan razia atau penertiban langsung di lapangan. Selain itu, kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi, seperti keberadaan gelandangan dan pengemis yang terindikasi sebagai pengguna narkoba, menambah beban kerja Satpol PP dalam operasi penertiban. Kondisi ini menuntut kehadiran personel dengan kompetensi khusus atau pendamping profesional seperti tenaga medis dan psikolog, yang umumnya tidak tersedia dalam struktur kelembagaan Satpol PP.

Sementara itu, Dinas Sosial justru memiliki sumber daya yang relatif lebih memadai, baik dari segi fasilitas (seperti tempat penampungan sementara) maupun tenaga fungsional seperti pendamping sosial dan petugas asesmen. Namun, Dinsos menghadapi tantangan dalam

hal pengumpulan data dan identifikasi gelandangan dan pengemis. Banyaknya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah, tidak memiliki dokumen identitas, atau merupakan anak-anak tanpa data keluarga yang lengkap, menyebabkan hambatan serius dalam proses asesmen dan intervensi sosial yang tepat sasaran. Ketidakjelasan basis data ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun program jangka panjang yang efektif, serta menghambat upaya evaluasi kebijakan secara akurat. Dalam kolaborasi ini, Yayasan Geratak berperan sebagai mitra pendukung yang membantu dalam proses rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjutan, terutama bagi gelandangan dan pengemis yang mengalami masalah psikis, ketergantungan zat, atau tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan dari Yayasan Geratak Kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa anggaran dan sumber daya yang dimiliki telah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan pembagian tugas yang jelas serta pelaksanaan fungsi sesuai dengan tupoksi masing-masing, ketidakseimbangan tersebut tidak menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi.

Indikator kedua berkenaan dengan insentif dengan temuan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak, Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, serta perwakilan Yayasan Geratak Kabupaten Sambas yang beroperasi di Kota Pontianak, ditemukan bahwa pengelolaan insentif telah diupayakan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing aktor dalam kolaborasi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan bahwa ada level instansi pemerintah, insentif yang diberikan kepada personel Satpol PP disesuaikan dengan beban kerja serta tingkat risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas di lapangan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban dan operasi terpadu, Satpol PP memerlukan dukungan insentif yang sebanding dengan intensitas dan karakter tugas mereka. Sementara itu, Dinas Sosial sebagai leading sector dalam penanganan sosial juga memperoleh alokasi insentif yang dinilai memadai. Namun demikian, pengelolaan anggaran untuk insentif secara teknis lebih banyak diadministrasikan oleh Dinas Sosial, termasuk dalam hal koordinasi dengan mitra non-pemerintah. Dalam hal ini, Yayasan Geratak sebagai salah satu pihak ketiga yang dilibatkan secara aktif dalam rehabilitasi sosial dan pendampingan kasus khusus terutama yang berkaitan dengan ketergantungan zat tidak menerima insentif secara langsung dari pemerintah daerah, melainkan melalui mekanisme koordinasi dengan Dinas Sosial. Secara umum, insentif yang diterima oleh masing-masing aktor dianggap cukup dan relevan dengan fungsi serta tanggung jawab yang dijalankan. Namun demikian, efektivitas dukungan sumber daya ini tetap membutuhkan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Indikator ketiga berkenaan dengan potensi konflik dengan temuan bahwa Dalam pelaksanaan kolaborasi antarlembaga dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak menunjukkan kecenderungan yang stabil dan relatif bebas dari konflik. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas yang jelas serta kesadaran terhadap batas kewenangan masing-masing aktor telah menjadi landasan penting dalam membangun hubungan kerja sama yang harmonis. Kondisi ini diperkuat dengan adanya komunikasi rutin serta pelatihan bersama yang difasilitasi sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi antartugas di lapangan. Koordinasi yang bersifat terbuka dan penyelesaian perbedaan pandangan secara langsung juga menjadi mekanisme penting dalam meredam potensi konflik sejak dini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam aspek

harmonisasi kerja antarinstansi telah tercapai melalui kejelasan struktur, komunikasi yang terbuka, dan pembagian peran yang proporsional. Namun, tantangan dalam aspek keberlanjutan hasil dan perbedaan pendekatan terhadap penanganan sosial masih perlu mendapat perhatian, khususnya dalam merancang strategi kolaboratif jangka panjang yang mampu menjawab akar masalah secara menyeluruh dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

3.2 Desain Kelembagaan

Pada dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui tiga indikator, indikator pertama berkaitan dengan forum kolaborasi kelembagaan dengan temuan, Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan mitra non-pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak telah difasilitasi melalui keberadaan forum koordinasi yang bersifat formal, terstruktur, dan berjalan secara berkala. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media pertemuan rutin antarlembaga, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mengharmonisasi pendekatan, menyatukan persepsi, serta merancang kebijakan operasional yang responsif terhadap dinamika sosial di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, forum tersebut dipandang efektif dalam menyelaraskan strategi lintas instansi. Pertemuan yang melibatkan unsur pimpinan masing-masing institusi dimanfaatkan sebagai ruang pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan kolektif. Mengenai koordinasi dengan pihak eksternal, dalam hal ini Yayasan Geratak Kabupaten Sambas, peran fasilitatif dipegang oleh Dinas Sosial. Komunikasi dengan pihak yayasan dilaksanakan secara berkala, namun tidak dalam bentuk pertemuan tatap muka rutin, mengingat keterbatasan geografis. Sebagai gantinya, komunikasi lebih sering difasilitasi melalui media daring. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa proses kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial telah memanfaatkan instrumen komunikasi dan fasilitasi secara optimal.

Pada indikator kedua berkenaan dengan aturan dasar dengan temuan Kelemahan utama dalam desain kelembagaan kolaborasi lintas instansi antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan mitra non-pemerintah seperti Yayasan Geratak, telah diidentifikasi bahwa kelemahan utama terletak pada desain kelembagaan yang belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis yang spesifik. Kolaborasi saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang meskipun sah secara hukum, memiliki cakupan norma yang bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama antarlembaga dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Absennya pedoman teknis yang rinci telah menimbulkan potensi celah dalam koordinasi, terutama pada situasi yang memerlukan respons cepat, pembagian tugas yang spesifik, dan prosedur operasional yang seragam.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi selama ini lebih banyak ditopang oleh kesadaran institusional, relasi informal yang telah terbina, serta kedisiplinan masing-masing instansi dalam menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, tanpa adanya kerangka regulasi kolaboratif yang lebih terperinci, kolaborasi ini masih berisiko mengalami inkonsistensi dalam jangka panjang, terutama jika terjadi pergantian struktur kepemimpinan atau perubahan kebijakan sektoral.

Pada indikator ketiga berkenaan dengan transparansi proses, dengan temuan Hasil wawancara dengan aktor-aktor kunci dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah telah berjalan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh kerangka regulasi yang spesifik.

Dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak sama-sama menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan saling menghargai sebagai pondasi utama dalam membangun kepercayaan antarlembaga. Transparansi dalam berbagi data, informasi kasus, serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan operasi penertiban maupun rehabilitasi

sosial menjadi faktor penguat dalam hubungan kerja sama yang terjalin. Informasi tidak dimonopoli oleh satu pihak, tetapi dibagikan secara setara untuk memastikan bahwa setiap keputusan merupakan hasil dari musyawarah bersama dan didasarkan pada konsensus kolektif. Lebih jauh, perwakilan Yayasan Geratak sebagai aktor non-pemerintah yang turut andil dalam penanganan sosial pasca-penertiban, khususnya dalam rehabilitasi atau pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal, menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam forum kolaboratif didasarkan pada prinsip saling mendukung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum terlembagakan secara formal melalui peraturan yang mengikat, kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak telah memperlihatkan praktik-praktik kolaboratif yang efektif. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya transparansi, komunikasi terbuka, dan penghargaan antarpihak sebagai elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang adaptif dan responsive.

3.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Pada dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui tiga indikator, indikator pertama berkaitan dengan kemampuan memfasilitasi dialog dengan temuan, Fasilitasi dialog diwujudkan melalui penyelenggaraan forum pertemuan rutin yang dirancang sebagai media pertukaran gagasan, identifikasi tantangan di lapangan, serta perumusan solusi yang disepakati secara kolektif. Forum tersebut tidak bersifat simbolik, melainkan berfungsi sebagai ruang institusional yang memungkinkan setiap instansi menyampaikan hasil evaluasi dan aspirasi internal untuk diintegrasikan ke dalam rencana kerja bersama.

Berdasarkan temuan lapangan, terlihat bahwa kepala pada masing-masing instansi, yakni Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memainkan peran sentral dalam menciptakan ruang interaksi deliberatif yang mendukung terbentuknya komunikasi yang konstruktif dan setara antarpihak. Sementara itu, dalam konteks relasi dengan pihak non-pemerintah, yaitu Yayasan Geratak Kabupaten Sambas, mekanisme fasilitasi dialog dilakukan secara jarak jauh melalui media daring. Meskipun pertemuan fisik tidak dapat dilakukan secara rutin karena faktor geografis, hal tersebut tidak menghambat berlangsungnya komunikasi yang substantif. Temuan ini merefleksikan bahwa kemampuan para pemimpin dalam memfasilitasi dialog telah memenuhi indikator penting dalam membangun arena kolaboratif yang fungsional.

Indikator kedua terkait dengan membangun kepercayaan dengan temuan unsur pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat integritas yang ditunjukkan oleh masing-masing aktor. Baik pada level pimpinan instansi maupun pelaksana teknis di lapangan, komitmen untuk menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi kelembagaan teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk kepercayaan antaraktor kolaboratif.

Dari hasil wawancara tersebut, integritas institusional tercermin dalam konsistensi pelaksanaan tugas oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai mandat kelembagaannya. Di tingkat operasional, pegawai lapangan menunjukkan keselarasan antara perintah struktural dengan implementasi teknis di lapangan, yang mengindikasikan adanya koordinasi vertikal yang solid dan loyalitas terhadap sistem kerja kolaboratif yang telah disepakati. Kepercayaan juga terbangun secara kuat lintas organisasi, termasuk dengan aktor eksternal seperti Yayasan Geratak Kabupaten Sambas. Meskipun entitas tersebut secara geografis berada di luar wilayah administratif Kota Pontianak, pelibatan mereka dalam proses rehabilitasi sosial tetap berlangsung dengan tingkat keandalan yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integritas kelembagaan yang tinggi dan pelaksanaan peran yang akuntabel telah menjadi fondasi utama dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan antaraktor dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.

Indikator ketiga berkenaan dengan membangun komitmen dengan temuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial secara aktif menerapkan strategi komprehensif yang mencakup penyelenggaraan forum diskusi reguler sebagai medium pertukaran informasi, pemetaan tantangan, dan

perumusan solusi bersama. Dalam konteks relasi eksternal, keterlibatan Yayasan Geratak sebagai mitra non-pemerintah menunjukkan inklusivitas kolaborasi lintas aktor. Meskipun secara geografis lembaga ini berasal dari luar wilayah administratif Kota Pontianak, peranannya dalam tahap rehabilitasi sosial tetap diakomodasi secara penuh oleh Dinas Sosial. Yayasan ini telah dirangkul secara strategis sebagai bagian dari rantai penanganan yang utuh, dan komunikasi dengan pihak yayasan difasilitasi secara daring mengingat keterbatasan jarak. Ketersediaan Yayasan Geratak dalam merespons kebutuhan Dinsos, serta konsistensi pelaksanaan tugasnya, menunjukkan bahwa kepercayaan tidak semata dibentuk oleh kedekatan spasial, melainkan oleh kinerja yang kredibel dan tanggung jawab institusional yang dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, hubungan kolaboratif antara aktor-aktor yang terlibat ditopang oleh kepercayaan timbal balik yang telah terbangun secara gradual melalui pengalaman kerja sama yang berulang. Komitmen kolektif dalam menjalankan peran masing-masing tidak hanya merefleksikan integritas kelembagaan, tetapi juga memperkuat kohesi dalam upaya penyelesaian isu sosial secara terpadu.

3.4 Proses Kolaborasi

Pada dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui empat indikator, indikator pertama berkaitan dengan Pemahaman Bersama tentang Misi dan Permasalahan, dengan hasil Keberhasilan kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh kemampuan semua aktor dalam membangun persepsi yang selaras mengenai misi bersama serta kesediaan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial secara aktif menjaga kesinambungan komunikasi lintas sektor dengan menekankan dialog terbuka dan berbasis kesetaraan. Mereka menilai bahwa koordinasi tidak hanya bersifat formal-institusional, tetapi juga bersifat interpersonal, yang memperkuat kohesi kerja di lapangan.

Yayasan Geratak, meskipun secara administratif berasal dari luar wilayah Kota Pontianak, tetap dirangkul secara strategis dalam kerangka kolaborasi. Komunikasi dengan yayasan tersebut dijalankan dengan intensitas tinggi melalui media daring, mengingat kendala geografis yang tidak memungkinkan pertemuan tatap muka rutin. Kendati demikian, efektivitas koordinasi tetap terjaga melalui responsivitas yang baik dan saling pengertian terhadap peran masing-masing.

Indikator kedua berkaitan dengan Pengaturan rencana strategis dan kesuksesan awal dengan temuan bahwa Kesuksesan awal dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak telah dikelola melalui perumusan rencana strategis yang bersifat partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh aktor utama sejak tahap awal pelaksanaan kebijakan. Penyusunan strategi diawali dengan pengidentifikasian bersama terhadap permasalahan inti di lapangan serta potensi masing-masing institusi. Proses ini dilakukan melalui forum-forum koordinatif yang memungkinkan pertukaran informasi dan pembagian peran secara proporsional.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial menekankan pentingnya sinergi antara kegiatan penertiban dan rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, Yayasan Geratak turut dirangkul secara aktif sebagai mitra strategis, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan pembinaan sosial. Secara keseluruhan, proses penyusunan rencana strategis dalam kolaborasi ini tidak hanya mengedepankan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat fondasi normatif berupa kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen bersama.

Indikator ketiga berkenaan dengan penemuan fakta bersama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penemuan fakta bersama dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak telah diupayakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang berlangsung secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dalam konteks pertukaran informasi, telah digunakan sistem informasi terpadu yang memungkinkan distribusi dan akses data secara real-time di antara instansi terkait. Dengan pendekatan ini, ketidaksinkronan data antarinstansi dapat diminimalisir, sementara kecepatan dalam merespons temuan lapangan dapat ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi dalam

pengumpulan informasi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui tokoh RT/RW yang berperan dalam memberikan laporan lokasi, waktu, serta pola kemunculan gelandangan dan pengemis di wilayah mereka.

Indikator keempat berkaitan dengan dialog tatap muka, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Dalam praktik kolaboratif yang diterapkan untuk menangani persoalan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, dialog tatap muka menempati posisi strategis sebagai instrumen penguatan komunikasi antarlembaga. Mekanisme ini secara rutin dioperasionalkan antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui pertemuan koordinatif baik dalam format formal maupun informal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Perwakilan Yayasan Geratak Kabupaten Sambas di Kota Pontianak, serta tokoh masyarakat (RT/RW), Keberlangsungan dialog tatap muka secara reguler turut menjadi medium untuk menyelaraskan agenda kerja, memperkuat distribusi peran, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi yang memerlukan penanganan cepat. Selain itu, peran masyarakat, khususnya melalui struktur RT/RW di wilayah yang kerap menjadi lokasi keberadaan gelandangan dan pengemis, juga dijadikan sebagai simpul informasi dalam proses dialog ini. Kehadiran masyarakat lokal dianggap penting dalam memberikan informasi berbasis konteks, yang sering kali tidak terjangkau oleh data institusional.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka antara aktor-aktor utama kolaborasi di tingkat pemerintah daerah telah difungsikan secara optimal, sementara partisipasi komunitas dan mitra eksternal tetap difasilitasi melalui berbagai kanal komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini diketahui bahwa aspek kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak pada awalnya menghadapi tantangan signifikan akibat ketimpangan sumber daya antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Meskipun Satpol PP memiliki personel yang lebih banyak, yakni sekitar 200 anggota dibandingkan dengan 50 pekerja sosial di Dinas Sosial, kedua instansi berhasil membangun sinergi yang efektif. Pembagian tugas yang jelas, dengan Satpol PP fokus pada penertiban dan Dinas Sosial pada rehabilitasi, menjadi kunci keberhasilan. Koordinasi intensif melalui pertemuan rutin mingguan dan sistem komunikasi terpadu memungkinkan respons cepat terhadap laporan masyarakat, dengan rata-rata waktu tanggapan kurang dari 30 menit. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam mengatasi fenomena "pintu putar" di mana 60% gelandangan dan pengemis kembali ke jalan dalam waktu 6 bulan setelah ditertibkan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk program pemberdayaan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kapasitas shelter yang saat ini hanya mampu menampung 100 orang. Meski demikian, kolaborasi ini telah menunjukkan hasil positif dengan penurunan 30% jumlah gelandangan dan pengemis yang terlihat di ruang publik selama dua tahun terakhir, membuktikan potensi model kerja sama ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memiliki personal seimbang antara Satpol PP dan Dinas Sosial Provinsi Riau (Anggraini & Mashur, 2022)

Kepemimpinan fasilitatif menjadi pilar utama dalam memperkuat kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. Implementasi dialog rutin mingguan, yang melibatkan 15 perwakilan kunci dari Satpol PP dan Dinas Sosial, menciptakan platform untuk pertukaran ide dan penyelarasan strategi. Pembagian tugas yang terstruktur, dengan Satpol PP menangani 70% operasi penertiban dan Dinas Sosial fokus pada 80% program rehabilitasi, menunjukkan komitmen dan integritas dalam menjalankan peran masing-masing. Tingkat kepercayaan antar instansi yang tinggi tercermin dari peningkatan 40% dalam pertukaran data dan informasi selama dua tahun terakhir. Forum diskusi triwulanan yang dihadiri oleh 50 pemangku kepentingan, termasuk LSM dan tokoh masyarakat, memperluas perspektif dan memperkaya solusi. Evaluasi berkala setiap semester menghasilkan rata-rata 8 rekomendasi perbaikan

yang 75% di antaranya berhasil diimplementasikan dalam kurun waktu 3 bulan. Komunikasi transparan melalui sistem pelaporan terpadu online, yang mencatat lebih dari 500 interaksi bulanan antara kedua instansi, menjadi kunci dalam menjaga sinergi yang harmonis. Pendekatan kepemimpinan ini telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional sebesar 35% dan penurunan waktu respons terhadap laporan masyarakat dari rata-rata 45 menit menjadi 25 menit. Hasil ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya dimana kepemimpinan fasilitatif dijalankan dengan baik di Kota Banda Aceh (Zahara & Mukhrijal, 2022).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa masih belum optimal dan belum terlembagakan secara baik akibat ketimpangan sumber daya, absennya regulasi kolaboratif, dan minimnya dialog tatap muka antaraktor.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari dalam pelaksanaan penelitian ini masih banyak data yang belum didapatkan sehingga penelitian menjadi tidak sempurna. Adapun keterbatasan penelitian ini disebabkan karena beberapa hal, pertama adalah keterbatasan waktu penelitian yang sangat sempit, kedua berkenaan dengan anggaran penelitian yang minim sehingga kelancaran mobilisasi menjadi lumayan terkendala, ketiga berkenaan dengan cakupan wilayah Pontianak yang luas sehingga di beberapa titik wilayah tidak mampu penulis lakukan observasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan secara rinci dan mendasar proses kolaborasi antar aktor yang sudah dilakukan sampai pelaksanaan kolaborasi dengan teori Ansell dan Gash tahun 2007. Dimana kekurangan teori ini terletak pada tidak adanya dimensi yang menganalisis secara khusus dari segi hasil kolaborasinya dan juga evaluasi hasilnya. Oleh karena itu pada penelitian mendatang diharapkan mampu untuk mengulas tentang evaluasi hasil kolaborasi apakah memang dirasakan baik atau belum ditengah Masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan bimbingan mereka yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Ibu Jatnika Gradiana Tefa atas bimbingan yang penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Penulis juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP, atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa selama proses penelitian. Tak lupa, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua sahabat yang telah berperan dalam pembentukan karakter penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi kontribusi kecil dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, N. W., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Falvo, N. (2018). Building a collaborative advantage: Network governance and homelessness policy-making in Canada C. Doberstein Vancouver: University of British Columbia Press, 2016. *Canadian Journal of Political Science*, 51(4), 951–952. <https://doi.org/10.1017/s0008423918000458>
- Hikmal, M., Malik, I., & Wahid, N. (2024). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15458>
- Madjid, U., Arijah, A., & Dewi, S. P. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4(2), 267–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Marbun, R., Adiputra, Y. S., Darmawan, E., Jl, A., Dompok, R., & Riau, P. K. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2023 Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia Sumber : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam . *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1327>
- Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 15–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>
- Ploszka, A. (2020). A Homeless Bill of Rights as a New Instrument to Protect the Rights of Homeless Persons. *European Constitutional Law Review*, 16(4), 601–624. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000310>
- Ranasinghe, P. (2015). Refashioning vagrancy: A tale of Law's narrative of its imagination. *International Journal of Law in Context*, 11(3), 320–340. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000178>
- Safiroh, L. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pengemis Dan Gelandangan (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surabaya). *UIN Sunan Ampel Surabaya*. [http://digilib.uinsa.ac.id/79570/1/Lailatus Safiroh_10040121084 OK.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/79570/1/Lailatus%20Safiroh_10040121084%20OK.pdf)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 162–176. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>
- Triana, Y., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i3.18>
- Utami, R. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Pengentasan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Yogyakarta. *UMY Repository*, 1–23. [https://etd.umy.ac.id/id/eprint/35713/1/Halaman Judul.pdf](https://etd.umy.ac.id/id/eprint/35713/1/Halaman%20Judul.pdf)
- Watts, B. (2014). Homelessness, empowerment and self-reliance in Scotland and Ireland: The

- impact of legal rights to housing for homeless people. *Journal of Social Policy*, 43(4), 793–810. <https://doi.org/10.1017/S0047279414000282>
- Wilson, R. G. (2019). Critical Vagrancy: On Reading with Elaine Freedgood. *Victorian Literature and Culture*, 47(3), 637–643. <https://doi.org/10.1017/S1060150319000305>
- Zahara, C. N., & Mukhrijal, W. A. (2022). Penerapan Model Collaborative Governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7(03). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22315/10491>

